

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia saat ini secara sadar merencanakan dan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat melalui kegiatan pembangunan. Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia dilakukan melalui pembangunan nasional (Saputra, 2015:1594). Akan tetapi, kesejahteraan dan kemajuan peradaban diyakini terhambat oleh masalah kemiskinan (Noviyasari, 2016:1). Kemiskinan merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi, terutama bagi negara-negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional (Noviyasari, 2016:1).

Suatu kondisi yang dikenal sebagai kemiskinan terjadi ketika seseorang kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (perumahan), pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Berbicara soal pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan adalah kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena manusia yang berpendidikan setidaknya berpeluang memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan melangsungkan kehidupan dengan baik (Susanto dan Pangesti, 2019:344). Sejalan dengan hal tersebut, Sohib (dalam Kuswardinah, 2016:249) mengungkapkan bahwa seluruh kegiatan manusia dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, memulihkan taraf hidup manusia dan masyarakat disebut sebagai pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci yang memiliki peran penting dalam penanggulangan masalah kemiskinan

baik di Negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka menengah dan jangka panjang serta melalui pendidikan dapat menentukan tingkat kesejahteraan bagi sebuah keluarga yang merupakan bagian dari capaian peradaban sebuah bangsa.

Hakikatnya, kebutuhan pendidikan itu sehubungan dengan segi-segi tingkah laku, dimana segi-segi tingkah laku tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan aspirasi (Yusnadi dan Handayani, 2019:175). Yusnadi dan Handayani (2019:179) mengungkapkan bahwa dalam mencapai keinginan atau kehendak pada diri seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan atau sikap yang akan dicapai dibutuhkan kegiatan yang disebut sebagai kebutuhan belajar. Kegiatan belajar yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar dapat berlangsung di lingkungan keluarga (pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal), maupun masyarakat (pendidikan nonformal). Salah satu penggolongan kebutuhan belajar yang dikemukakan oleh Johnstone dan Rivera dalam bukunya *Volunteers of Learning* (Yusnadi dan Handayani, 2019:180) diklasifikasikan menjadi kebutuhan belajar yang berhubungan dengan tugas pekerjaan, kegemaran dan rekreasi, agama, pengetahuan umum, kesejahteraan keluarga, penampilan diri, peristiwa-peristiwa baru, usaha pertanian, serta jasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 26,5 juta penduduk miskin di Indonesia pada September 2021. Mayoritas penduduk miskin berada di Pulau Jawa yang disusul dengan Pulau Sumatera yang menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebanyak 5,86 juta orang atau sekitar 22,1%. Sebaran penduduk miskin di Pulau Sumatera dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1,27 juta orang (persentase penduduk

miskin 8,49%) pada periode September 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin terbagi menjadi penduduk miskin perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) No. 07/01/Th. XXV, 17 Januari 2022 Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk miskin yang didominasi dari perkotaan. Dimana jumlah penduduk miskin perkotaan pada periode September 2021 sebanyak 725,04 ribu jiwa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kantong-kantong kemiskinan (*slum area*) tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan juga perkotaan. Tumbuhnya kemiskinan di perkotaan diakibatkan karena adanya penyerbuan-penyerbuan ke kota oleh penduduk desa secara besar-besaran untuk dapat bertahan hidup dan mencari nafkah (Sjafari, 2014). Menjadi ibu kota bagi suatu provinsi tidak dapat menjamin masyarakatnya terhindar dari masalah kemiskinan. Kota Medan menjadi penyumbang penduduk miskin terbanyak diantara Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah 193,03 ribu jiwa pada Maret tahun 2021. Berdasarkan data BPS 2022, kecamatan Medan Belawan merupakan kecamatan dengan jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu tertinggi di Kota Medan yaitu sebanyak 22,817 pada tahun 2021.

Diantara 10 kelurahan miskin yang tersebar di 3 kecamatan di Kota Medan menurut BPS 2019, seluruh kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Belawan tergolong dalam kelurahan miskin yang terdiri dari 6 kelurahan diantaranya Kelurahan Pulau Sicanang, Kelurahan Belawan Bahagia, Kelurahan Belawan Bahari, Kelurahan Belawan II, serta Kelurahan Belawan I. Berikut ini adalah tabel data kelurahan miskin kota Medan tahun 2018:

Tabel 1.1 Data Kelurahan Miskin Kota Medan Tahun 2018

Kecamatan	Kelurahan	Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin
Medan Labuhan	Pekan Labuhan	5.212	1.588
	Nelayan Indah	1.885	732
Medan Marelan	Terjun	6.548	1.582
	Paya Pasir	2.746	952
	Labuhan Deli	4.149	1.850
Medan Belawan	Pulau Sicanang	2.979	1.600
	Belawan Bahagia	2.662	1.540
	Belawan Bahari	2.582	1.591
	Belawan II	4.959	2.368
	Belawan I	4.470	2.265
Jumlah		38.192	16.068

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2019

Kecamatan Medan Belawan merupakan daerah pesisir Kota Medan dan wilayah bahari dan maritim yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.. Kecamatan Medan Belawan menjadi kecamatan dengan jumlah kelurahan miskin terbanyak diantara kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Medan dengan angka tertinggi berada di Kelurahan Belawan II. Kelurahan Belawan II merupakan salah satu daerah yang mengalami fenomena kemiskinan perkotaan.

Di Indonesia, istilah "masyarakat miskin perkotaan" mengacu pada mereka yang cenderung tidak memiliki akses terhadap layanan dasar dibandingkan dengan orang yang tidak hidup dalam kemiskinan dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang lebih rendah, kurangnya jaminan pekerjaan, dan tinggal di pemukiman dengan kualitas dibawah standar (Gunawan, 2022). Salah satu permasalahan yang paling sentral dihadapi oleh masyarakat miskin perkotaan

adalah masalah pendidikan. Dilihat dari tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir menurut kelompok pengeluaran tahun 2021, kelompok pengeluaran terbawah dan menengah bawah menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang rendah.

Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Pendidikan dan Pelatihan

Kelompok Pengeluaran	Tingkat Partisipasi Remaja dan Dewasa dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	
	15-24 tahun	25-64 tahun
Terbawah	38,90	0,69
Menengah bawah	42,68	0,96
Menengah	45,48	1,23
Menengah atas	48,82	1,60
Teratas	58,79	3,29

Sumber: Susenas Modul MSBP

Sjafari (2014) mengungkapkan bahwa umumnya tingkat pendidikan formal bagi anggota keluarga miskin di perkotaan menunjukkan pada tingkat pendidikan yang rendah. Selama ini tingkat pendidikan formal anggota keluarga miskin di perkotaan memiliki tingkat keragaman yang tidak begitu tinggi. Anggota keluarga miskin yang berpendidikan sedang dan tinggi masih terbatas. Tingkat pendidikan formal keluarga miskin di perkotaan cenderung rendah dikarenakan dominan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mereka beranggapan bahwa biaya pendidikan dan tanggungan biaya lainnya sekarang ini sangat mahal yang tidak mampu mereka atasi.

Menurut mereka, meski mayoritas sekolah negeri saat ini menawarkan pendidikan gratis, menurut mereka masih ada biaya lain yang harus ditanggung. Di sisi lain, mereka kurang memiliki dorongan untuk memperbaiki kehidupannya melalui pendidikan dan menyerah dengan alasan biaya yang tidak cukup. Mereka tampaknya sudah mewarisi tingkat pendidikan yang rendah dari orang tua mereka. Kesadaran keluarga miskin dalam mendorong anggota keluarganya untuk melanjutkan pendidikan relatif masih begitu rendah. Pada akhirnya, diyakini bahwa rendahnya pendidikan ini menjadi kondisi yang turun temurun.

Disisi lain, hal yang sama terjadi pada pendidikan nonformal. Menurut Sjafari (2014) tingkat pendidikan nonformal anggota keluarga miskin yang tinggal di wilayah perkotaan seringkali digambarkan dalam kategori rendah (Sjafari, 2014). Keluarga miskin perkotaan selalu mengandalkan pendidikan nonformal yang sifatnya gratisan menjadi salah satu penyebab terbatasnya keterlibatan anggota keluarga miskin dalam pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yang pernah diterima anggota keluarga miskin sebagian besar pada bidang keterampilan seperti pertukangan, kesehatan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya, sedangkan untuk jenis pendidikan nonformal pada bidang kewirausahaan dan berdagang masih minim. Pada umumnya pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagian besar anggota keluarga miskin baik yang ada di Kota besar maupun Kota sedang, keduanya berada pada kategori yang rendah.

Akan tetapi, di Kelurahan Belawan II yang merupakan kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kecamatan Medan Belawan, masih ada ditemukan keluarga-keluarga miskin yang mempunyai tekad dan keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan keluarganya agar dapat keluar dari lingkaran

kemiskinan. Keluarga-keluarga miskin ini terlihat sangat berupaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan keluarganya walaupun belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal dan dengan pendapatan mereka yang tidak sesuai, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi mereka.

Maka dari itu, perlu dilakukan analisis terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan pada keluarga miskin perkotaan di Kelurahan Belawan II, Medan Belawan, agar dapat mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga miskin perkotaan di Kelurahan Belawan II.

1.2 Fokus Penelitian

Dengan keterbatasan peneliti maka dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin perkotaan di kelurahan Belawan II, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan pada keluarga miskin perkotaan di Kelurahan Belawan II Medan Belawan yang objek utamanya merupakan keluarga-keluarga miskin perkotaan yang berada di Kelurahan Belawan II, Medan Belawan yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan pendidikan pada keluarga miskin perkotaan di Kelurahan Belawan II?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan pendidikan pada keluarga miskin perkotaan di Kelurahan Belawan II.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini antara lain:

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan melalui kebutuhan belajar yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terutama keluarga miskin.
- b) Memberikan sumbangan ilmiah dalam Ilmu Pendidikan Masyarakat, yaitu mengetahui bagaimana salah satu komunitas sasaran APENMASI yaitu masyarakat miskin kota dalam memenuhi kebutuhannya.
- c) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan pada keluarga miskin perkotaan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2) Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memiliki perhatian yang lebih besar lagi terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan.

- b) Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi dalam mengoptimalkan pendidikan keluarga miskin sebagai upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kelurahan Belawan II, Medan Belawan.
- c) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan ilmu yang didapat selama menimba ilmu di Program Studi Pendidikan Masyarakat karena masyarakat miskin kota termasuk salah satu komunitas sasaran asosiasi pendidikan masyarakat Indonesia.

